

KOLABORASI PENTAHHELIX, NILAI-NILAI SPIRITUAL DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) DI INDONESIA

Delly Maulana^{1*}, Rethorika Berthanila²
^{1,2} Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia

*Korespondensi : rethorikaberthanila@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan sejatinya harus bisa memberikan perubahan disuatu negara atau daerah, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Dalam mewujudkan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 2025-2045 yang berkualitas, rasional, prioritas, tepat sasaran, dan sesuai dengan permasalahan Banten maka perlu ada keterlibatan seluruh Stakeholders atau pemangku kepentingan pembangunan (Pemerintah, Sektor Bisnis, Akademisi, Society, dan Insan Media) dalam proses penyusunannya melalui mekanisme model kolaborasi pentahelix. Selain itu, kekuatan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal harus dapat memberikan nilai dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan permasalahan dilapangan, dimengerti dan dipahami, serta merupakan hasil rekomendasi terbaik untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan Banten. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder, berupa dokumen penelitian, artikel ilmiah, laporan penelitian, kebijakan, dan data-data lain terkait dengan kajian pembangunan daerah di Provinsi Banten. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk menggambarkan isu-isu startegis pembangunan di Provinsi Banten dan menggunakan analisis hirarki proses untuk menggambarkan prioritas strategi-strategi pembanguna untuk Banten Emas 2045. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa empat pilar yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Banten, yakni : *Pertama*, Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; *Kedua*, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; *Ketiga*, Pemerataan Pembangunan; dan *Keempat*, Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan melalui peningkatan kualitas demokrasi yang substantif, serta reformasi kelembagaan dan birokrasi di Provinsi Banten.

Kata Kunci : Kearifan Lokal; Kolaborasi Pentahelix; Perencanaan Pembangunan.

ABSTRACT

True development must be able to provide changes in a country or region, both in quantity and quality. In realising the Banten Province 2025-2045 Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) policy that is quality, rational, priority, right on target, and by Banten's problems, it is necessary to involve all development stakeholders (Government, Business Sector, Academics, Society, and Media Insan) in the preparation process through the pentahelix collaboration model mechanism. In addition, the power of spiritual values and local wisdom must be able to provide value in the regional development planning

process so that it is by the problems in the field, understood and understood, and is the best recommendation to be able to solve Banten's problems. The research method in this study is a qualitative research method using secondary data, in the form of research documents, scientific articles, research reports, policies, and other data related to the study of regional development in Banten Province. The data analysis technique uses qualitative data analysis techniques to describe the strategic issues of development in Banten Province and uses hierarchical process analysis to describe the priority of development strategies for Banten Emas 2045. The results of the study illustrate that four pillars must be realized by the Banten Provincial Government, namely: First, Human Development and Mastery of Science and Technology; Second, Sustainable Economic Development; Third, Equitable Development; and Fourth, Strengthening National Resilience and Governance through improving the quality of substantive democracy, as well as institutional reform and bureaucracy in Banten Province

Keywords : *Local Wisdom; Pentahelix Collaboration; Development Planning.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan sejatinya harus bisa memberikan perubahan disuatu negara atau daerah, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Tujuan pembangunan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada strategi kebijakan pembangunan jangka panjang yang optimal. Dalam mewujudkan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 2025-2045 yang berkualitas, rasional, prioritas, tepat sasaran, dan sesuai dengan permasalahan Banten maka perlu ada keterlibatan seluruh Stakeholders atau pemangku kepentingan pembangunan (Pemerintah, Sektor Bisnis, Akademisi, Society, dan Insan Media) dalam proses penyusunannya melalui mekanisme model kolaborasi pentahelix.

Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Pemerintah dan DPRD Provinsi Banten harus menggunakan informasi stakeholders atau pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RPJPD Banten Tahun 2025-2045 sebagai

bagian dari proses pengambilan keputusan. Karena sejatinya, konsep seperti ini merupakan proses pembuatan kebijakan yang inovatif, dimana seluruh stakeholders secara langsung bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Secara faktual, ada beberapa isu strategis yang merupakan bagian dari persoalan Banten yang harus segera diselesaikan untuk dapat merealisasikan Visi Banten Emas 2045, yakni : *Pertama*, isu kemiskinan. Trend kemiskinan di Banten saat ini mengalami peningkatan akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Kemiskinan di Banten saat ini sekitar 6.16 Persen atau berada di peringkat 7 secara nasional; *Kedua*, persoalan pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Mei 2023 ada sebanyak 486,350 orang. Jumlah itu menjadikan Banten daerah paling banyak pengangguran dibandingkan daerah lain di Indonesia.(Kompas, 2023) Padahal Banten memiliki jumlah Kawasan terbesar kedua setelah DKI Jakarta dengan luasan sekitar 0,91 persen atau sekitar 3.175 Hektar serta memiliki jumlah perusahaan sekitar 8.724

Perusahaan. (B. P. S. P. Banten, 2022).

Ketiga, isu ketimpangan Pembangunan. Persoalan ketimpangan Pembangunan antara utara, tengah, dan selatan menjadi isu yang sampai saat ini belum terselesaikan. Kabupaten Lebak dan Pandeglang belum memiliki tingkat pertumbuhan dan andil pertumbuhan yang maksimal serta memiliki tingkat celah fiskal yang masih tinggi. Selain itu, persoalan ketimpangan pembangunan manusia pun masih mengalami ketimpangan. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa, IPM tertinggi di Kota Tangerang Selatan dan terendah di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. *Keempat*, isu degradasi lingkungan. Persoalan lingkungan di Provinsi Banten masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan, misalnya terkait pengelolaan sampah, pemanasan global, pemanfaatan ruang yang melanggar aturan lingkungan hidup, serta persoalan polusi udara. Data polusi udara yang dirilis Indeks kualitas udara (AQI) menunjukkan polusi udara di Provinsi Banten sekitar PM2.5 dengan menempatkan 3 wilayah memiliki polusi udara yang buruk, yakni Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang. (Indonesia, 2023).

Selain itu, persoalan sampah juga masih menjadi persoalan lingkungan di Provinsi Banten; dan yang *Kelima* adalah persoalan infrastruktur. Persoalan infrastruktur juga masih menjadi isu yang harus diselesaikan, seperti percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Banten. Selain itu, persoalan overloading dan kerusakan jalan harus menjadi prioritas dan harus segera diselesaikan. Kemudian, persoalan infrastruktur penunjang pertanian, seperti fasilitas irigasi dan lahan pertanian yang semakin menipis harus

menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Banten.

Kemudian dari hasil pemetaan riset terkait strategi kebijakan pembangunan daerah menunjukkan bahwa strategi kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk mengatasi asimetri, mengurangi disparitas, dan mencapai pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah. Strategi ini melibatkan pendekatan sistemik, pemikiran holistik, dan koordinasi proses perencanaan dan pengendalian (Dykha et al., 2022). Strategi pembangunan sinergis Beijing-Tianjin-Hebei (BTH) di China berfokus pada pengurangan kesenjangan pembangunan regional melalui pembangunan keuangan. Ini menekankan skala keuangan, mengendalikan risiko likuiditas keuangan, dan mengoptimalkan efisiensi keuangan (Dong et al., 2022). Dalam kasus Kabupaten Cilacap di Indonesia, strategi pembangunan daerah didasarkan pada kegiatan ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Strategi tersebut juga membahas masalah aksesibilitas regional dan kebutuhan akan fasilitas kesehatan masyarakat (Maab, 2023). Di Kabupaten Bengkayang, Indonesia, strategi pembangunan ekonomi daerah meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama, tata kelola, infrastruktur, produktivitas sektor unggulan, pembangunan desa, daerah perbatasan, dan kelestarian lingkungan (Anggraeni Tjondro Sugianto et al., 2022). Perencanaan strategis memainkan peran penting dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional, dan harus menjadi bagian dari kebijakan regional negara (Kotov, 2021).

Dari latar belakang di atas maka dalam artikel ini akan menggambarkan terkait potensi-potensi yang dimiliki oleh Provinsi Banten, identifikasi isu-isu strategis terkait permasalahan pembangunan di Provinsi Banten, dan Prioritas Startgei kebijakan pembangunan untuk merealisasikan Banten Emas di tahun 2045.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kaulitataif dengan menggunakan data-data sekunder, berupa dokumen penelitian, artikel ilmiah, laporan penelitian, kebijakan dan data-data lain terkait dengan kajian pembangunan daerah di Provinsi Banten. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif untuk menggambarkan isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Banten dan menggunakan analisis hirarki proses untuk menggambarkan prioritas strategi pembangunan untuk Banten Emas 2045.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Potensi di Provinsi Banten

Sejarah telah mencatat bahwa posisi geografis Provinsi Banten merupakan daerah yang sangat strategis sehingga menjadikannya sebagai salah satu pusat peradaban penting di Indonesia sejak zaman dulu. Cerminan. Selanjutnya, Provinsi Banten merupakan Provinsi yang memiliki potensi yang strategis, Ada beberapa potensi yang dimiliki oleh Provinsi Banten. *Pertama*, Banten merupakan wilayah yang memiliki akses terhadap pasar nasional sekaligus wilayah yang berdampingan dengan Provinsi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Kemudian, Indonesia dengan 259 juta jiwa penduduk

merupakan sebuah potensi pasar yang besar, dimana konsentrasi utama persebaran penduduk adalah 62,1% di Pulau Jawa dan 16,2% di Pulau Sumatera, sementara Banten adalah simpul penghubung antara kedua pulau besar tersebut; *Kedua*, Akses terhadap jaringan internasional. Banten memiliki akses langsung terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, ke arah utara memiliki tendensi dengan wilayah Asia Pasifik dan Amerika, sedangkan ke arah barat memiliki 5 tendensi dengan wilayah Asia Barat, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Australia. (D. P. Banten, 2023).

Ketiga, secara wilayah, Provinsi Banten memiliki 8 Kabupaten/Kota, yakni : Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS tahun 2023 sekitar 12.381.098 jiwa. Selanjutnya, jumlah penduduk dengan rentang usia 24-39 atau kaum milenial sebanyak 3.540.864 jiwa (kaum milenial dan generasi Z akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap realisasi Banten Emas Tahun 2045, jikalau dikelola dengan baik serta memiliki kompetensi yang maksimal); dan *Keempat*, potensi ekonomi. Provinsi Banten memiliki potensi yang luar bisa, baik dari segi perdagangan, jasa, pelabuhan, pariwisata, pertambangan, pertanian, perikanan, dan kelautan, serta industri. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat perekonomian Banten berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II Tahun 2023 mencapai Rp. 201,67 triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 4,83 persen. (P. P. Banten, 2023).



Gambar 1. Strategi Banten Emas 2045

Sumber : (Rahman, 2021)

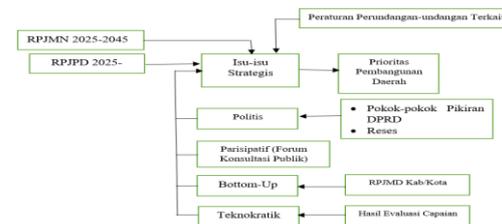
Dalam konteks merealisasikan visi pembangunan Indonesia, khususnya di Provinsi Banten tahun 2045 maka ada empat pilar yang harus direalisasikan oleh Banten sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni : (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

2. Strategi Kebijakan dalam Merealisasikan Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2045

Perencanaan strategis kebijakan dalam pembangunan daerah merupakan syarat penting untuk dijadikan sebagai metode dalam pengelolaan negara atau daerah. Kondisi ini perlu menekankan pada aspek peramalan dan penilaian indikator yang akurat untuk mengembangkan rencana strategis pembangunan yang efektif. (Lobkova et al., 2021). Bahkan, Quede mengungkapkan bahwa beberapa alasan tentang kegagalan hasil kebijakan itu dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, (Maulana, 2023) Oleh karena itu, strategi kebijakan pembangunan harus mengedepankan isu-isu yang strategis yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui strategi-strategi

kebijakan pembangunan daerahnya,

Kemudian, rencana strategis akan menggambarkan rute dari posisi sekarang yang dijelaskan oleh misi menuju posisi masa depan yang diinginkan yang dijelaskan oleh visi. (Kettunen, 2006) Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 261 menjelaskan bawah perencanaan pembangunan daerah harus menggunakan beberapa pendekatan, yakni : pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Secara konseptual, pendekatan teknokratis adalah pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Dan pendekatan politis adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD (Pokok-pokok pikiran DPRD dan Reses). Kemudian, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas adalah suatu proses hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga



Nasional.

Gambar 2. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber : (Pemerintah Republik Indonesia,

2014) : data diolah

Dari hasil penelitian menunjukkan ada beberapa strategi perencanaan pemerintah daerah yang harus dilakukan untuk merealisasikan pembangunan Banten emas 2045, yakni : *Pertama*, menyelesaikan persoalan kemiskinan melalui program-program yang terbaik agar masyarakat Banten menjadi sejahtera dan terputus dari rantai kemiskinan. Misalnya melalui program beasiswa bagi masyarakat miskin sampai jenjang pendidikan S1 dan program pemberian peluang pekerjaan padat karya bagi masyarakat. Selain itu, Banten harus menjadi tempat investasi yang kondusif. Ada beberapa manfaat dari kebijakan beasiswa dalam upaya pengentasan kemiskinan, yakni : (1) akses pendidikan yang berkualitas akan merata kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial; (2) beasiswa dapat memberikan peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan sehingga mereka terbuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan memberikan kontribusi positif pada pengentasan kemiskinan; dan yang ke (3) setelah lulus, mereka dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi pribadi dan keluarga.

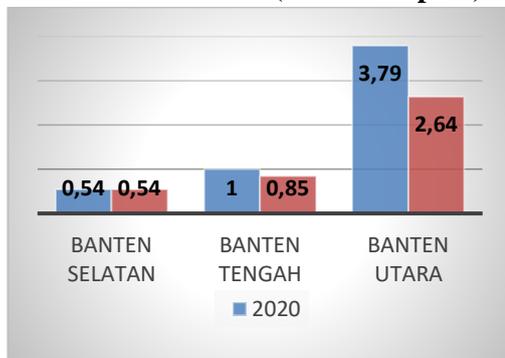
Kedua, menyelesaikan persoalan pengangguran di Provinsi Banten melalui program membuka lapangan pekerjaan dengan bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta memberikan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar tenaga kerja melalui kolaborasi pentahelix (Pemerintah, Swasta, Akademis, NGO, dan Media). Kolaborasi antar aktor sangat penting dalam kebijakan

pengentasan pengangguran. Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dalam kolaborasi aktor dalam pengentasan pengangguran, yakni : (1) ada pemahaman yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam pengembangan solusi dalam mengatasi pengangguran di Provinsi Banten; (2) Kolaborasi akan memungkinkan optimalisasi dalam pemanfaatan sumber daya, karena berbagai pihak dapat menyumbangkan keahlian, dana, dan infrastruktur mereka untuk mendukung inisiatif pengentasan pengangguran di Provinsi Banten; dan yang ke (3) dengan melibatkan berbagai aktor, kebijakan pengentasan pengangguran dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih efektif. Kolaborasi memungkinkan adopsi strategi yang lebih beragam dan inovatif, menciptakan solusi yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi pasar kerja. Kemudian, dalam studi yang dilakukan Anesi dan De Donder, mereka meneliti tentang pentingnya kolaborasi di antara berbagai kelompok aktor dalam membentuk hasil kebijakan untuk mengurangi pengangguran (Anesi & de Donder, 2013). Demikian pula, kajian yang dilakukan oleh Hansen et al. Kajian ini menyoroti perlunya kolaborasi dan legitimasi di antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan layanan holistik atau terintegrasi untuk mengatasi pengangguran jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan pengangguran yang efektif memerlukan kolaborasi dan koordinasi di antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (Chistensen et al., 2022).

Ketiga, menyelesaikan persoalan ketimpangan pembangunan antara utara, tengah dan selatan disegala bidang dengan

menjadikan Pemerintah Provinsi Banten sebagai fasilitator sekaligus penyeimbang pembangunan. Misalnya melalui program pembangunan pendidikan, infrastruktur, pengembangan wisata di wilayah selatan Banten. Hasil pemetaan persoalan ketimpangan pembangunan menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak dan Pandeglang belum memiliki tingkat pertumbuhan dan andil pertumbuhan yang maksimal serta memiliki tingkat celah fiskal yang masih tinggi. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa andil pertumbuhan ekonomi Banten Selatan sekitar 0,29 persen, Banten Tengah sekitar 1,52 persen, dan Banten Utara sekitar 2,63 persen. Sementara itu, belanja modal pembangunan di wilayah Banten Selatan masih sangat timpang dengan belanja modal wilayah Banten Utara. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah masing-masing, terutama dalam hal Pendapatan Asli Daerah. (BPS Provinsi Banten, 2022).

Grafik 1. Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota Se-Banten Menurut Pembagian Daerah/Kawasan Tahun 2020-2021 (Triliun Rupiah)



Sumber: BPS Banten Tahun 2022

Dari hasil pemetaan riset terkait ketimpangan pembangunan menunjukkan bahwa ketimpangan dalam pembangunan

regional adalah masalah signifikan yang mempengaruhi negara-negara secara global. Beberapa penelitian telah meneliti masalah ini dari perspektif yang berbeda. Li dkk. (Li et al., 2022) menemukan bahwa perbedaan pendapatan pertanian global terutama disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah di negara-negara Selatan Global, menunjukkan perlunya bantuan keuangan untuk meningkatkan sektor pertanian mereka. Jadhav (Jadhav, 2023) menyelidiki hubungan antara ketimpangan regional dan pembangunan ekonomi dan mengidentifikasi hubungan berbentuk U terbalik, menunjukkan bahwa ketidaksetaraan regional pada awalnya meningkat dan kemudian menurun dengan meningkatnya pendapatan. Chang dkk berfokus pada ekspansi perkotaan di Tiongkok dan menemukan bahwa disparitas regional dalam ekspansi spasial perkotaan lebih besar daripada ekspansi sosial ekonomi perkotaan, dengan tren konvergen. (Chang et al., 2022)

Keempat, menyelesaikan persoalan lingkungan melalui program-program pembangunan yang berkelanjutan dengan melihat sisi-sisi lingkungan sebagai dasar kebijakan, seperti merevitalisasi angkutan publik, konsisten dalam pelaksanaan pembangunan sesuai komitmen rencana tata ruang dan wilayah, sekaligus mengedepankan nilai-nilai kepentingan publik (Meckelburg & Wardana, 2024); Dan *Kelima*, menyelesaikan persoalan infrastruktur melalui program-program percepatan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, seperti : percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Banten, salah satunya jalan tol Serang-Panimbang, kawasan infrasturuktur tanjung lesung, proyek bandara startegis lainnya, dan lain-lain

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Banten sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten akan semakin menggelembung. Selain itu, untuk menciptakan Banten sebagai daerah ketahanan pangan maka fasilitasi infrastruktur pertanian, seperti perbaikan irigasi dan penyediaan lahan pertanian harus menjadi prioritas pembangunan Banten kedepan.

3. Kolaborasi Pentahelix, Nilai Spiritual, dan Kearifan Lokal dalam Proses Perumusan Perencanaan

Kemudian dalam konteks merealisasikan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2045 sebagai gerbang investasi strategis yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa maka ada empat pilar yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Banten, yakni : *Pertama*, Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui percepatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Banten serta berkolaborasi dengan lembaga pendidikan/Perguruan Tinggi terkait pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Kedua*, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan melalui peningkatan investasi, percepatan industri dan pariwisata, meningkatkan pembangunan maritim, pemantapan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan air dan energi, serta berkomitmen terhadap kualitas lingkungan hidup. *Ketiga*, Pemerataan Pembangunan melalui percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan, pemerataan pembangunan wilayah, dan pembangunan infrastruktur

yang merata dan terintegrasi. *Keempat*, Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan melalui peningkatan kualitas demokrasi yang substantif, serta reformasi kelembagaan dan birokrasi di Provinsi Banten.

Oleh karena itu, perlu ada mekanisme mendengar pendapat yang melibatkan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan melalui konsep kolaborasi pentahelix dalam membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 bisa terserap informasi secara maksimal. Karena sejatinya penerapan demokrasi substantif adalah membuka ruang dialog dan partisipatif dalam proses penyusunan kebijakan. Selain itu, kita juga perlu menengok kembali kekuatan spiritual dan kearifan lokal di Provinsi Banten dalam menyusun RPJPD Banten 2025-2045, sebagai upaya menemukan solusi yang dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat Banten sampai akar rumput, termasuk dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 2025-2045. Sehingga rencana pembangunan Provinsi Banten akan mendapatkan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan dilapangan, dimengerti dan dipahami, serta merupakan hasil rekomendasi terbaik untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan Banten, sekaligus dapat merealisasikan visi Provinsi Banten sebagai “Gerbang Investasi Strategis yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Dalam upaya merealisasikan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2045 sebagai gerbang investasi strategis yang maju, sejahtera dan berkelanjutan berdasarkan iman dan taqwa, kolaborasi

pentahelix menjadi pendekatan yang sangat relevan. Model pentahelix menekankan keterlibatan lima aktor utama (Prasetyo et al., 2023), yaitu pemerintah, akademisi dunia usaha, masyarakat sipil dan media, dalam perencanaan dan implementasi pembangunan daerah. Pemerintah memiliki peran utama sebagai fasilitator dalam memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dapat berkontribusi secara optimal. Akademisi berperan dalam menyediakan kajian ilmiah berbasis data yang mendukung kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dunia usaha berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang sejalan dengan kepentingan sosial dan lingkungan, sementara masyarakat sipil memiliki peran dalam memberikan masukan serta menjadi bagian aktif dalam implementasi kebijakan. Sementara itu, media bertindak sebagai penghubung informasi sekaligus pengawas dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pembangunan daerah. Dalam konteks pengurangan kesenjangan pembangunan, pendekatan pentahelix juga telah terbukti efektif dalam perencanaan wilayah dan pengelolaan sumber daya seperti yang diterapkan dalam kebijakan pengelolaan pariwisata berbasis kolaborasi antar stakeholder (Lestari et al., 2024).

Namun, tantangan dalam implementasi model pentahelix masih cukup besar, terutama dalam hal koordinasi antar stakeholder, perbedaan kepentingan, serta ketimpangan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu diperlukan strategi yang lebih konkrit dalam membangun sinergi antaraktor. Salah satu langkah strategis adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan peran sebagai

fasilitator dan katalisator pembangunan (Burhanuddin et al., 2024). Selain itu akademis harus lebih dilibatkan dalam proses perencanaan, bukan hanya sebagai penyedia data, tetapi juga dalam monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan (Huski et al., 2022). Dunia usaha pun perlu diberi insentif untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan melalui skema kemitraan publik dan swasta serta kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (Chiswa, 2024). Lebih jauh masyarakat sipil perlu difasilitasi untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan melalui forum-forum konsultasi publik yang lebih inklusif (Tsujioka et al., 2015), sedangkan media harus lebih aktif dalam melakukan edukasi publik serta menyebarluaskan informasi terkait kebijakan pembangunan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

Selain kolaborasi pentahelix aspek spiritual dalam pembangunan juga memiliki peran penting dalam membentuk arah kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial. Di Provinsi Banten, yang memiliki akar budaya kesilaman yang kuat nilai-nilai spiritual dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penerapan nilai spiritual dalam perencanaan pembangunan dapat diwujudkan dalam tiga aspek utama yaitu etika dalam pengambilan kebijakan, pembangunan berbasis spiritual serta keseimbangan antar aspek material dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Dalam aspek etika, kebijakan pembangunan harus disusun berdasarkan prinsip keadilan sosial, kejujuran serta transparansi guna mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Singh, 2023). Selanjutnya pembangunan berbasis spiritual dapat diterapkan melalui integritas nilai-nilai

agama dalam kebijakan pendidikan dan sosial, sehingga pembangunan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga membentuk karakter masyarakat yang berakhlak mulia. Sementara itu, keseimbangan antara aspek material dan spiritual dapat diwujudkan melakukan program pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan psikososial masyarakat, seperti penguatan ketuhanan keluarga, pemberdayaan komunitas berbasis keagamaan, serta pembangunan sarana ibadah yang mendukung kehidupan sosial masyarakat (Satinder & Joan, 2016).

Di sisi lain, kearifan lokal juga memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Provinsi Banten memiliki berbagai bentuk kearifan lokal yang dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Seperti strategi gotong royong, musyawarah mufakat, serta praktik-praktek ekonomi berbasis komunitas (Aswita et al., 2018; Costumado & Chemane, 2024). Dengan memperkuat kolaborasi pentahelix, mengintegrasikan nilai spiritual dalam kebijakan pembangunan serta mengadopsi kearifan lokal sebagai bagian dari sinergi pembangunan daerah RPJPD Banten 2025-2024 dapat menjadi model pembangunan yang tidak hanya inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga berbasis identitas dan karakter daerah.

D. KESIMPULAN

Sejatinya rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 harus merupakan rencana yang membumi, yakni sesuai

dengan permasalahan yang substantif serta merupakan hasil rekomendasi terbaik dan memiliki daya jangkau rencana yang panjang untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat Banten, sekaligus dapat merealisasikan Banten Emas Tahun 2045 yang sejahtera, adil, dan Makmur. Oleh karena rencana pembangunan Provinsi Banten harus sesuai dengan harapan seluruh stakeholders melalui kolaborasi pentahelix, mengedepankan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Banten

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anesi, V., & de Donder, P. (2013). A coalitional theory of unemployment insurance and employment protection. *Economic Theory*, 52(3), 941–977. <https://doi.org/10.1007/s00199-011-0671-1>
- Anggraeni Tjondro Sugianto, H., Kiky Vuspitasari, B., Studi Manajemen, P., & Shanti Bhuana, I. (2022). Gorontalo Development Review Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Regional Economic Development Strategy. *Gorontalo Development Review (GOLDER)*, 5(1), 16–25.
- Aswita, D., Suryadarma, I. G. P., & Suyanto, S. (2018). Local wisdom of sabang island society (aceh, Indonesia) in building ecological intelligence to support sustainable tourism. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 22(2), 393–402. <https://doi.org/10.30892/gtg.22210-297>
- Banten, B. P. S. P. (2022). *laporan*

- Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Banten Tahun 2022.*
- Banten, D. P. (2023). *Profil Daerah Provinsi Banten*. DPMPTSP Provinsi Banten.
- Banten, P. P. (2023). *Triwulan II Tahun 2023, Ekonomi Provinsi Banten Tumbuh 4,83 Persen Terhadap Year on Year*.
- BPS Provinsi Banten. (2022). *Bunga Rampai Isu Terkini Pembangunan Daerah Provinsi Banten*. BPS Banten.
- Burhanuddin, B., Syufri, S., Asriani, A., Hartawan, H., & Saputra, A. N. (2024). Exploring the role of regional capacity in human resource development in Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 6(October), 1–10.
<https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1412098>
- Chang, Z., Liu, S., Wu, Y., & Shi, K. (2022). The Regional Disparity of Urban Spatial Expansion Is Greater than That of Urban Socioeconomic Expansion in China: A New Perspective from Nighttime Light Remotely Sensed Data and Urban Land Datasets. *Remote Sensing*, 14(17).
<https://doi.org/10.3390/rs14174348>
- Chiswa, N. (2024). Unravelling Critical Success Factors in Public-Private Partnership Implementation. *European Procurement & Public Private Partnership Law Review*, 19(1), 39–60.
<https://doi.org/10.21552/epppl/2024/1/7>
- Christensen, S. E., Hansen, M. P., & Triantafyllou, P. (2022). Legitimizing collaboration, collaborating to legitimate: Justification work in “holistic” services for long-term unemployed persons. *Journal of Social Policy*, 1–21.
<https://doi.org/DOI:10.1017/S004727942200071X>
- Costumado, M., & Chemane, J. A. D. (2024). *Stakeholder Engagement and Community Participation in Sustainable Development in Southern Africa* (pp. 48–72).
<https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0477-8.ch004>
- Dong, S., Wang, Y., & Ma, X. (2022). A Study of the Policy Effects of Beijing-Tianjin-Hebei Synergistic Development Strategy on Regional Financial Development: Based on the Synthetic Control Method. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2022.
<https://doi.org/10.1155/2022/2526209>
- Dykha, M., Lukianova, V., Polozova, V., Tanasienko, N., & Zavorodnia, T. (2022). Strategic directions of the national policy in the context of the asymmetry of the regional development. *Cuestiones Políticas*, 40(74), 497–514.
<https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.27>
- Huski, S., Vajzović, E., & Hibert, M. (2022). Strategic Positioning of Media and Information Literacy: the Role of Scientific Research Platforms. *Vjesnik Bibliotekara Hrvatske*, 65(2), 93–113.
<https://doi.org/10.30754/vbh.65.2.968>
- Indonesia, C. (2023). *Banten Juara Polusi Pagi Ini, 3 Kota Masuk Kategori Tidak Sehat*.

- Jadhav, V. (2023). Dynamics of national development and regional disparity: evidence from 184 countries. *Journal of Economic Studies*, 50(5), 1048–1062. <https://doi.org/10.1108/JES-02-2022-0080>
- Kettunen, J. (2006). Strategic planning of regional development in higher education. *Baltic Journal of Management*, 1(3), 259–269. <https://doi.org/10.1108/17465260610690917>
- Kompas. (2023). *Angka Pengangguran di Banten Tertinggi se-Indonesia, Penyebabnya Banyak Perantau*.
- Lestari, N. P. N. E., Suidarma, I. M., & Gorda, A. A. A. N. R. (2024). *Strategic Development for the Tourism Industry Using the Penta Helix Model (A Case Study of Kuta Beach, Bali Tourist Attraction)* (pp. 324–334). https://doi.org/10.1007/978-3-031-55911-2_31
- Li, J., Cheong, T. S., Huang, W., & Shum, W. Y. (2022). Examining the Regional Disparity of Agricultural Development: A Distribution Dynamics Approach. *Sustainability (Switzerland)*, 14(19). <https://doi.org/10.3390/su141912779>
- Lobkova, E., Lobkov, K., & Mehta, N. (2021). Strategic Planning of Regional Development as Instrument of Ensuring Stability and Economic Security of a Territory. *E3S Web of Conferences*, 295. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202129501019>
- Maab, M. H. (2023). Regional Development Strategy in the South Cross Road Network of Cilacap. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 6(1), 125. <https://doi.org/10.20884/juss.v6i1.8165>
- Maulana, D. (2023). Pemetaan Riset Kebijakan Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Bibliometric Analysis. In *DISRUPSI KEILMUAN SOSIAL ERA DIGITAL Perspektif Administrasi Negara, Komunikasi, dan Hukum* (pp. 1–10). PT RajaGrafindo Persada.
- Meckelburg, R., & Wardana, A. (2024). The political economy of land acquisition for development in the public interest: The case of Indonesia. *Land Use Policy*, 137, 107017. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.107017>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Kementerian Sekretariat Negara RI*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Prasetyo, N. D., Arrsa, R. C., Haq, M. C. A., & Kusuma Dewi, R. C. (2023). *The Juridical Framework of the Pentahelix Model in the Preparation of Regional Medium-Term Development Planning*. 11(3).
- Rahman, A. (2021). Quo Vadis Visi Negara Maju 2045. In *BOOK CHAPTER*. researchgate.net.
- Satinder, D., & Joan, M. (2016). *Spirituality and Sustainability: New Horizons and Exemplary Approaches* (S. Dhiman & J. Marques (eds.)). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319->

34235-1

- Singh, N. (2023). Spiritual Leadership for Sustainable Development Policy. In *Applied Spirituality and Sustainable Development Policy* (pp. 117–131). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-83753-380-020231006>
- Tsujinaka, Y., Ahmed, S., & Kobashi, Y. (2015). *Constructing Co-Governance Between Government and Civil Society: An Institutional Approach to Collaboration* (pp. 175–189). https://doi.org/10.1007/978-3-319-15218-9_11